



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MEKAR SATRIA UTAMA**
2. Jabatan : **DIREKTUR**
3. NHK : **81101**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 6.311.169.600**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 282 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 2.403.566.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 131 m2/142 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, WARISAN Rp. 602.143.100
3. Tanah dan Bangunan Seluas 270 m2/36 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 622.368.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 723 m2/18 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.099.860.500
5. Tanah dan Bangunan Seluas 214 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.583.232.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 558.300.000**

1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 2.300.000
2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, HONDA REBEL CMX500AH IN MT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 98.000.000
4. MOBIL, HONDA CRV CR-V 1.5TC PRESTIGE CVT CKD Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
5. MOBIL, JEEP CHRYSLER/CHEROKEE LIMITED COUNTRY 4.0 Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 153.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 341.500.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	1.380.466.500
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	564.753.171
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	9.156.189.271
III. HUTANG	Rp.	2.244.929.596
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.911.259.675

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.